

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dimulai dengan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya alam, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk hal tersebut dalam perencanaan diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran melalui pendekatan secara menyeluruh.

Hierarki perencanaan pembangunan di daerah disusun sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yaitu setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dan juga sesuai dengan pasal 150 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh Daerah

Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dalam pasal 151 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra BAPPEDA Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2013 -2018

BAPPEDA Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta bidang statistik.

Pada akhirnya, Renstra BAPPEDA Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Banyumas,serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Pembuatan Renstra Bappeda Kabupaten Banyumas mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011- 2031.
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan untuk :

- a. Menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Bappeda dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di BAPPEDA pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun
- c. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Bappeda Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2013– 2018;
- d. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
- b. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2013– 2018;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/ L Dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

- 4.1 Visi Dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi Dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyumas merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya uraian tugas, pokok, fungsi dan tatakerja Bappeda dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas nomor 26 tahun 2010 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Banyumas.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi BAPPEDA meliputi ;

1. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Dan Statistik.
2. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Dan Statistik.
3. Pembinaan, Fasilitasi Dan Pelaksanaan Tugas Perencanaan Dibidang Ekonomi, Prasarana Dan Pengembangan Wilayah, Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial Serta Serta Statistik Dan Pengendalian Lingkup Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Dan Statistik.
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan.
6. Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati.

Sebagai lembaga perangkat daerah yang merumuskan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, maka BAPPEDA mempunyai fungsi yang strategis dalam menyusun perencanaan secara makro melalui pendekatan lintas sektoral, aspiratif dan partisipatif.

Keterpaduan dalam perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dengan pusat dan program – program daerah melalui forum-forum koordinasi lintas sector dan bidang, sehingga diharapkan output yang dicapai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 – 2018

Forum koordinasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dan strategis dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, pencapaian tujuan, sasaran, program dan kesiapan diantara dokumen perencanaan daerah

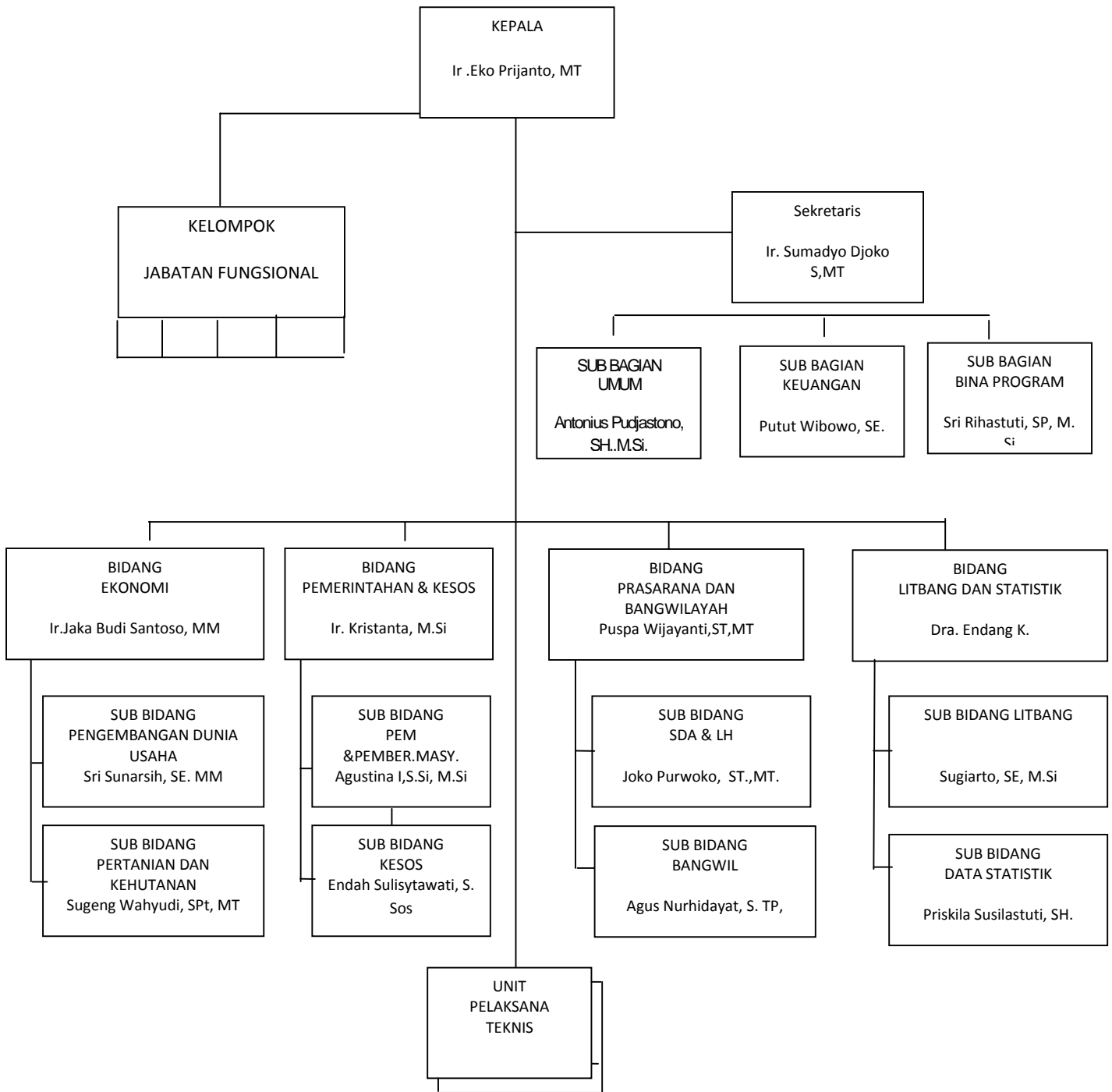
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 27 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1)Sub Bagian Bina Program;
 - 2)Sub Bagian Keuangan
 - 3)Sub Bagian Umum;
3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - 2). Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2). Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2). Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
6. Bidang Penelitian Pengembangan dan statistik, terdiri dari :
 - 1.) Sub Bidang Penelitian Pengembangan ;
 - 2.) Sub Bidang Data dan Statistik.

7. UPT

Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Perda nomor 27 tahun 2009.



Adapun deskripsi kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas nomor 26 tahun 2010 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok :

- Memimpin perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistic
- Memimpin pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: Musrenbang; Penyusunan dokumen RKPD; Penyusunan dokumen RPJM; Penyusunan dokumen RPJP.
- Memimpin penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan serta statistik
- Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan dan statistik.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bappeda dibantu oleh Sekretaris, para Kabid, Para Kasubid dan Para Kasubag.

2. Sekretaris Bappeda mempunyai tugas pokok :

- Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan Dinas.
- Mengoordinasikan penyiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas.
- Mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- Mengoordinasikan penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
- Mengoordinasikan penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- Mengoordinasikan penyiapan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas, penyiapan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, penyiapan pelayanan administrasi surat-menyurat, penyiapan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, penyiapan pelayanan kehumasan, penyiapan pelayanan keprotokolan, penyiapan pelayanan administrasi kepegawaian, penyiapan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag, yaitu Kasubag Keuangan, Kasubag Bigram dan Kasubag Umum mempunyai tugas pokok :

a. Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana
- Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.
- Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kasubag Bina Program mempunyai tugas pokok :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

- Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas.
 - Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
 - Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kasubag Umum mempunyai tugas pokok :
- Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan Dinas.
 - Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, pelayanan keprotokolan, pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Kabid Ekonomi mempunyai tugas pokok :
- Mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah, kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pertanian serta kehutanan, Rakorbang Bidang pengembangan dunia usaha dan pertanian serta kehutanan, penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang pengembangan dunia usaha dan pertanian serta kehutanan, penyusunan data perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang pengembangan dunia usaha dan pertanian serta kehutanan..
 - Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pertanian serta kehutanan.

- Mengoordinasikan penyiapan penyusunan laporan kinerja di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pertanian serta kehutanan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kabid Ekonomi dibantu oleh 2 orang Kasubid yaitu Kasubid Pengembangan Dunia Usaha dan Kasubid Pertanian Dan Kehutanan

- a. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usahamempunyai tugas pokok:
 - Menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan Pengembangan Industri, Pertambangan dan energi, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi dan Perusahaan daerah.
 - Menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
 - Menyiapkan fasilitasi Rakorbang Bidang Pengembangan Industri, Pertambangan dan energi, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi dan Perusahaan daerah.
 - Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan Industri, Pertambangan dan energi, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi dan Perusahaan daerah
 - Menyiapkan evaluasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan Pengembangan Industri, Pertambangan dan energi, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi dan Perusahaan daerah.
 - Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan Pengembangan Industri, Pertambangan dan energi, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi dan Perusahaan daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- b. Kepala Subbidang Pertanian Dan Kehutanan mempunyai tugas pokok :
 - Menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Pertanian dan Kehutanan.
 - Menyiapkan perumusan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
 - Menyiapkan fasilitasi Rakorbang Bidang Pertanian dan Kehutanan

- Menyiapkan penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang Pertanian dan Kehutanan.
 - Menyiapkan penyusunan data perencanaan pembangunan di bidang perencanaan Pertanian dan Kehutanan.
 - Menyiapkan evaluasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan Pertanian dan Kehutanan.
 - Menyiapkan pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian dan Kehutanan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok :
- Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengembangan wilayah.
 - Mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
 - Mengoordinasikan penyiapan Rakorbang Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengembangan wilayah.
 - Mengoordinasikan penyiapan penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengembangan wilayah.
 - Mengoordinasikan penyiapan penyusunan data perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengembangan wilayah.
 - Mengoordinasikan penyiapan evaluasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pengembangan wilayah.
 - Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengembangan wilayah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kabid Prasarana Dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kasubid Pengembangan Wilayah

a. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok :

- Menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- Menyiapkan perumusan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah
- Menyiapkan fasilitasi Rakorbang Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Menyiapkan penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Menyiapkan penyusunan data perencanaan pembangunan di bidang perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- Menyiapkan evaluasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Menyiapkan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok :

- Menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan infrastruktur sarana prasarana transportasi/jalan, perumahan permukiman, tata bangunan, draenase, air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah
- Menyiapkan perumusan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah
- Menyiapkan fasilitasi kegiatan Rakorbang Bidang Infrastruktur.
- Menyiapkan penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang Pengembangan Wilayah
- Menyiapkan penyusunan data perencanaan pembangunan di bidang perencanaan infrastruktur sarana prasarana transportasi/jalan, perumahan permukiman, tata bangunan, draenase, air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah.

- Menyiapkan evaluasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan infrastruktur sarana prasarana transportasi/ jalan, perumahan permukiman, tata bangunan, drainase, air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah.
 - Menyiapkan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan infrastruktur sarana prasarana transportasi/jalan, perumahan permukiman, tata bangunan, drainase, air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok :
- Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial.
 - Mengoordinasikan penyiapan perumusan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
 - Mengoordinasikan penyiapan Rakorbang bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial.
 - Mengoordinasikan penyiapan penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial.
 - Mengoordinasikan penyiapan penyusunan data perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Kepala Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial dibantu oleh 2 orang Kasubid yaitu Kasubid Pemerintahan dan Pemberdayaan dan Kasubid Kesejahteraan Sosial

- a. Subbidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan mempunyai tugas pokok :
- Menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan Pemerintahan Umum Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat.
 - Menyiapkan perumusan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
 - Menyiapkan fasilitasi kegiatan Rakorbang Bidang Pemerintahan Umum Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat.

- Menyiapkan penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
- Menyiapkan penyusunan data perencanaan pembangunan di bidang perencanaan Pemerintahan Umum Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat.
- Menyiapkan evaluasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan Pemerintahan Umum Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat.
- Menyiapkan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan Pemerintahan Umum Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok :

- Menyiapkan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi.
- Menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
- Menyiapkan fasilitasi Rakorbang Bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi.
- Menyiapkan penyusunan Skala Prioritas SKPD Subbidang Kesejahteraan Sosial
- Menyiapkan penyusunan data perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi
- Melalui evaluasi pelaksanaan arah dan kebijakan kegiatan dan program di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi
- Menyiapkan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..

6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik mempunyai tugas pokok :
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kerja bidang penelitian, pengembangan dan statistik guna menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - Mengoordinasikan perumusan penyusunan database tentang pelaksanaan penelitian pengembangan, IPTEK, data dan statistik dalam rangka menunjang penyusunan perencanaan pembangunan.
 - Mengoordinasikan perumusan dan fasilitasi musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
 - Mengoordinasikan perumusan kebijakan umum pembangunan daerah dan menyusun prioritas pembangunan daerah.
 - Mengoordinasikan monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - Mengoordinasikan perumusan laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota dan desa dari SKPD penerima dana tersebut.
 - Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan jaringan penelitian dan pengembangan antar institusi litbang yang ada.
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan daerah.
 - Mengoordinasikan perumusan penyelenggaraan/ pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di SKPD.
 - Mengoordinasikan perumusan program difusi dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - Mengoordinasikan perumusan bahan/ data penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
 - Mengoordinasikan penyusunan pelaporan penyelenggaraan program kerja bidang penelitian pengembangan dan statistik
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik dibantu oleh 2 orang Kasubid yaitu : Kepala Subbidang Penelitian Pengembangan dan Kepala Subbidang Penelitian Pengembangan

- a. Kepala Subbidang Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok :
- Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan program kerja dalam rangka penelitian pengembangan guna menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - Menyiapkan fasilitasi pembentukan jaringan penelitian dan pengembangan antar institusi litbang yang ada.
 - Menyiapkan bahan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Litbang berupa arah kebijakan, isu strategis permasalahan dan program kerja Litbang.
 - Menyiapkan penyelenggaraan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan.
 - Menyiapkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
 - Menyiapkan penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD dalam pelaksanaan Litbang.
 - Menyiapkan penyelenggaraan program difusi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Menyiapkan penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana penelitian pengembangan
 - Menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penelitian dan pengembangan
 - Menyiapkan penyelenggaraan penerapan Iptek tepat guna dalam kegiatan produktivitas masyarakat.
 - Menyiapkan pelaksanaan kegiatan yang mendorong pengembangan Iptek dan Litbang yang terpadu sehingga hasilnya terasa dampak manfaatnya terhadap pembangunan daerah.
 - Menyiapkan pelaksanaan penyusunan data base tentang pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta Iptek.
 - Menyiapkan penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan program kerja.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- a. Kepala Subbidang Data Dan Statistik mempunyai tugas pokok :
- Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah.
 - Menyiapkan bahan penyusunan data perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian program-program.
 - Menyiapkan dan merekap data hasil usulan kecamatan dan SKPD untuk forum SKPD dalam Musrenbang Kabupaten
 - Menyiapkan penyusunan konsep skala prioritas SKPD sebagai dasar kebijakan umum pembangunan daerah.
 - Menyiapkan penyusunan *data base* perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan data, statistik dan pengendalian.
 - Menyiapkan pelaksanaan monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan arah perencanaan pembangunan daerah.
 - Menyiapkan penyusunan laporan kinerja pembangunan daerah (pelaksanaan tugas, rakor dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa) yang berasal dari dana APBN
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..

2.2. SUMBER DAYA SKPD

Gambaran sumber daya Bappeda dapat dilihat pada data berikut:

1. Keadaan aparatur yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas menurut golongan.

Sekretariat / Bidang	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah (orang)
Kepala Bappeda	-	-	-	1	1
Sekretariat	1	5	4	3	13
Bid. Litbang dan Statistik	-		4	2	6
Bid. Ekonomi	-		5	1	6
Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	1	1	3	2	7
Bid. Prawasara dan Pengembangan Wilayah	-		7		7
Tenaga Honorer					5
Jumlah					45

2. Keadaan Personil menurut Eselon

Eselon	Jumlah (orang)
Eselon II	1
Eselon III	5
Eselon IV	11
Jumlah	17

3. Keadaan Personil menurut Pendidikan Formal

- a. Pasca Sarjana (S2) : 15 orang
- b. Sarjana (S1) / D.IV : 15 orang
- c. Sarjana Muda (D.I – D.III) : 1 orang
- d. SLTA : 7 orang
- e. SMP : - orang
- f. SD : 2 orang

4. Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan :

- 1. Diklat PIM Tingkat II : 1 orang
- 2. Diklat PIM Tingkat III : 4 orang
- 3. Diklat PIM Tingkat IV : 11 orang

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain kebutuhan akan Sumberdaya Manusia (SDM) perencanaan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja, diperlukan pula ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana Bappeda pada saat ini dapat dikelompokkan menjadi sarana mobilitas, prasarana analisis perencanaan dan prasarana ruang kerja.

Kondisi sarana dan prasarana mobilitas Bappeda meliputi 6 buah kendaraan roda empat, 24 kendaraan roda dua. Sedangkan sarana dan prasarana analisis perencanaan utamanya adalah 29 buah perangkat computer dan jaringannya, 24 buah laptop, 19 buah IPAD, dan sarana kerja lain yang mendukung kegiatan perencanaan seperti : printer, kamera, LCD proyektor, dan alat scan untuk mendukung program e-office. Jaringan komputer telah memiliki kapasitas networking antar sub bidang dan bidang dalam rangka integrasi analisis antar bidang pembangunan dan menjamin kecepatan kerja.

Sedangkan sarana ruang kerja, telah memiliki ruang kerja yang representatif dengan perlengkapan AC pada setiap ruangnya.

Meskipun sarana prasarana Bappeda tersebut sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala yaitu dengan semakin meningkatnya beban kerja, kebutuhan akan ruang kerja semakin luas dan ruang khusus untuk penyimpanan arsip dan buku – buku hasil produk Bappeda Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu pada saat mendatang perlu segera dikembangkan ketersediaan ruang kerja yang semakin representatif.

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

BAPPEDA Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah dan statistik di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yaitu:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain : DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta ;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif ;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran ;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan SKPD terkait ;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten Banyumas kepada masyarakat dan instansi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan statistik, tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda dengan indikator dan capaian sebagai berikut

1. Review Pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama periode Renstra Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Berdasar SPM	Berdasar IKK	Berdasar Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke..					Realisasi Capaian Tahun Ke...					Rasio Realisasi				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	1 dok	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	1 dok	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	1 dok	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4.	<i>Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD</i>		100 %	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

				Target Renstra SKPD Tahun Ke..					Realisasi Capaian Tahun Ke...					Rasio Realisasi					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
5.	Buku “ Kabupaten Dalam Angka”		1 dok		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6.	Buku “PDRB Kabupaten”		1 dok		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

No	Uraian	Anggaran (2008-2012)					Realisasi Anggaran (2008-2012)					Rasio Anggaran dengan Realisasi (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	BELANJA DAERAH Belanja tidaklangsung																	
	Belanja langsung - Belanja pegawai			2.848.829.988						2.592.703.985								
	- Belanja barang dan jasa			1.490.028.300						1.376.835.415								
	- Belanja modal			15.800.000						13.175.000								

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
- Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.
- Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi
- Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
- Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

b. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.

- Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- Adanya dukungan dari legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- Adanya kerjasama dengan BPS atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
- Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan. Produk hukum tersebut antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Banyumas.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Banyumas yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governanc*

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Kabupaten Banyumas terletak pada 108°39'17"–109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05"–7°37'10" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.226 Ha atau 24,27 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 52.062 Ha (39,22%) dan lahan bukan pertanian seluas 48.390 Ha (36,45 %).

Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik yang unik, kurang lebih 50% adalah wilayah pegunungan dengan konsekuensi rawan bencana tanah gerak, permasalahan lahan kritis menjadi tantangan bagi per encanaan pembangunan dalam wilayah Kabupaten. BAPPEDA Kab. Bany umas dalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif- alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2013 -2018 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas.
- b. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas seperti masyarakat, DPRD , Perguruan Tinggi, LSM, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas.
- c. Belum optimalnya pelayanan prima dalam bidang perencanaan.

Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang perencanaan, maka sudah tentu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman **RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Banyumas Tahun 2013- 2018**. pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Badan Perencanaan Kabupaten Banyumas, terutama masyarakat Kabupaten Banyumas.

d. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kabupaten Banyumas.

Keberadaan aparatur perencana baik pada BAPPEDA maupun pada SKPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2013–2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2013–2018 adalah :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ”

Pemerintahan yang **bersih**, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai pemerintahan yang

bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan yang **adil** berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat yang **sejahtera** menurut Joseph Murphy pada bukunya "*Think Yourself Rich*" dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja

yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta *virtuous cycle* dampak pembelajaran.

Masyarakat yang **berbudaya**. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

3.2.2. Misi

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang

telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan,

sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki *multiplier* efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat.

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini

perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensinya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, *urban primacy* yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah

yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan

berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas yaitu misi 1

Table 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Visi:

Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Bersih Dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 :			
1.1	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat	Kualitas rencana umum pembangunan daerah	Pengusulan Program dan kegiatan SKPD dan dari aspirasi Masyarakat belum disertai analisis yang akurat	Adanya forum SKPD dan Musrenbang
1.2	Program pengembangan data/informasi	Belum optimalnya analisis data/informasi dalam rencana pembangunan daerah	Data / informasi untuk perencanaan pembangunan belum konsisten	Adanya dokumen data yang disusun secara terus menerus
1.3	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kemampuan teknis aparatur perencana masih rendah	Waktu pelaksanaan diklat yang terlalu lama	Banyaknya tawaran diklat dari berbagai instansi
1.4	Program perencanaan pembangunan daerah	Keharusan pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta laporan evaluasi		

		dan pengendalian rencana pembangunan		
1.5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Masih rendahnya dukungan rencana pembangunan ekonomi terhadap rencana pembangunan daerah		
1.6	Program perencanaan sosial budaya	Masih rendahnya dukungan rencana sosial budaya terhadap rencana pembangunan daerah		
1.7	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum optimalnya dukungan data/informasi/statistik bagi penyusunan rencana pembangunan daerah	Data / informasi untuk perencanaan pembangunan belum konsisten	Adanya dokumen data yang disusun secara terus menerus
	Program kerjasama pembangunan	Belum optimalnya kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan dunia usaha/lembaga dalam penyediaan infrastruktur ekonomi dan sosial		
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya	Belum tersedianya masterplan percepatan dan perluasan		

	alam	pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial		
--	------	--	--	--

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja;
- 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

b. Strategi

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

1. Strategi Eksternal:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan

- daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
 - 3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
 - 4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan;
 - 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

2. Strategi Internal:

- 1) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai;
- 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;
- 4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas;
- 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

c. Program

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program- programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- 1) Program teknis / Program Perencanaan Pembangunan Nasional
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

Kegiatan indikatif yang dilakukan, yaitu:

- Penyusunan rencana pembangunan nasional dan

pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.

- Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

2) Program generik

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur

Dibandingkan dengan program-program dalam Renstra 2005-2009, jumlah program dalam Renstra 2010-2014 lebih sedikit. Perbedaan lainnya ada pada substansi dan masalah kesesuaian dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan digunakan oleh semua kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga. Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan- kegiatan pendukung, termasuk gaji dan tunjangan pegawai

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD, maka indikator kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas untuk periode tahun 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut:

24.3.	Buku "Kecamatan Dalam Angka" (dokumen)	27	27	27	27	27	27	27	135
24.4.	Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	5
24.5.	Buku "Indeks Harga konsumen Triwulanan"	1	1	1	1	1	1	1	1
24.6.	Buku Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	5
24.7.	Buku "Nilai Tukar Petani" (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	5

RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENYDANAAN INDIKATIF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013 - 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi serta Peran Kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas	Terlaksananya tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas secara optimal.	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	1.400.000	100%	1.400.000	100%	1.400.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	7.200.000	Bappeda
					Kegiatan Ketatausahaan	Terlaksananya pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	100%	100%	1.400.000	100%	1.400.000	100%	1.400.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	7.200.000	Bappeda
	Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan perencana	86 SKPD	86 SKPD	86 SKPD	175.000	86 SKPD	192.500	86 SKPD	200.000	86 SKPD	200.000	86 SKPD	200.000	86 SKPD	967.500	Bappeda
					Keg. Fasilitas Perencanaan Umum dan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Terfasilitasinya Perencanaan SKPD dan terlaksananya peningkatan kemampuan aparat perencana	86 SKPD	86 SKPD	86 SKPD	175.000	86 SKPD	192.500	86 SKPD	200.000	86 SKPD	200.000	86 SKPD	200.000	86 SKPD	967.500	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Iptek	Terlaksanakannya fasilitasi pengembangan dan penerapan IPTEK	2 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif	Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksanakannya Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dok	1 dok	1 Dok	400.000	1 Dok	420.000	1 Dok	430.000	1 Dok	940.000	1 Dok	440.000	5 dok	2.630.000	Bappeda
			Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Daerah (RPJ, RPJMD, RKP, RENSTRA, RENJA)		Keg. Penyusunan Raperda RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 -2018	Tersusunnya Raperda RPJMD tahun 2013-2018	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Penyusunan RKP Kabupaten Banyumas	Tersusunnya RKP Kab. Banyumas	1 dok	1 dok	1 Dok	400.000	1 Dok	420.000	1 Dok	430.000	1 Dok	440.000	1 Dok	440.000	5 dok	2.130.000	Bappeda
					Keg. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan	Terfasilitasi perencanaan pembangunan	1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Kajian Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018	Tersusunnya dokumen KLHS	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	250.000	-	-	1 dok	250.000	Bappeda
					Keg. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJM 2013-2018	Tersusunnya dokumen KLHS Pembangunan Jangka Menengah Kab.	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	250.000	-	-	-	250.000	Bappeda
			Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Prasnwil		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksannnya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber alam	6 urusan	6 urusan	6 urusan	1.575.000	6 urusan	1.407.500	6 urusan	1.223.250	6 urusan	1.250.000	6 urusan	1.250.000	6 urusan	6.705.750	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Keg. Analisis Perencanaan Kebijakan Pengembangan Prasarana Wilayah	Terlaksananya Dukungan Program Perencanaan Prasarana Wilayah	6 urusan	6 urusan	6 urusan	325.000	6 urusan	357.500	6 urusan	393.250	6 urusan	400.000	6 urusan	400.000	6 urusan	1.875.750	Bappeda
					Keg. Penyusunan Raperda Rencana Detail Kawasan Strategis Kawasan Pariwisata Baturaden	Tersusunnya raperda RTDR kawasan Strategis Baturaden	-	1 dok	1 dok	200.000	1 dok	220.000	-	-	-	-	-	-	-	420.000	Bappeda
					Keg. Pendukung Program Partisipasi Irigasi Sector Project (PISP)	Terlaksannnya kegiatan PISP	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Fasilitas Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Terlaksananya Dukungan Program Pengembangan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Fasilitas Pengelolaan Irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas	Terfasilitasinya pengelolaan irigasi dan SDA	100%	250.000	100%	750.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	2.750.000	Bappeda
					Keg. Pendukung PAMSIMAS	Terlaksannnya kegiatan PAMSIMAS	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas	Terlaksannnya dukungan pembangunan AMPL	100%	250.000	100%	300.000	100%	330.000	100%	330.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	1.660.000	Bappeda
					Keg. Pendukung Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program PPSP	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Keg. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kawasan Pariwisata Baturaden	Tersusunnya RDTR kawasan Staregis Baturaden	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Perencanaan RP3KP	Tertindakannya Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan dan Infrastruktur Irigasi di Kabupaten Banyumas	Terinventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta rencana pengembangan irigasi di Kab. Banyumas	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
			Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Penkesos		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tertindakannya program perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya	17 urusan	17 urusan	17 urusan	924.000	17 urusan	600.000	17 urusan	667.500	17 urusan	722.750	17 urusan	739.388	17 urusan	3.653.638	Bappeda
					Keg. Analisis Perencanaan Tahunan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dan ASPM	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang pemkesos	3 dok	3 dok	3 dok	250.000	3 dok	275.000	3 dok	302.500	3 dok	332.750	3 dok	349.388	3 dok	1.509.638	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Keg. Pendamping Rencana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Perlindungan Anak	Tertindaknya Bintek ARG bagi Vocal Point pada SKPD dan RAD Kota Layak Anak	86 SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	
					Keg. Fasilitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Kota Layak Anak	Tertindaknya Bintek ARG bagi Vocal Point pada SKPD dan RAD Kota Layak Anak	-	86 SKPD	86 SKPD	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	
					Keg. Fasilitas Pengembangan PUS Kabupaten /Kota (Ban.Gub)	Tertindaknya Rapat Koordinasi Forum PUS Kab. Banyumas	2 dok	2 dok	2 dok	74.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	74.000	Bappeda
					Keg. Kemiskinan Kualitas Hidup dan Alternatif Kebijakan (Kajian Pada Kantong Kemiskinan di Kabupaten Banyumas)	Terselenggaranya Kajian Kemiskinan Kualitas Hidup dan Alternatif Kebijakan (Kajian pada Kantong Kemiskinan di Kab. Banyumas)	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	
					Keg. Fasilitas Program PLPBK, USRI dan Penanggulangan Kemiskinan	Tertindaknya Pelaksanaan Program PLPBK, USRI dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	3 Keg	3 Keg	3 Keg.	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Keg.	500.000	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Terfasilitasinya perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	100%	250.000	100%	275.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	1.125.000	Bappeda	
					Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	-	-	-	-	100%	75.000	100%	90.000	100%	90.000	100%	90.000	100%	345.000	Bappeda	
			Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi	9 urusan	9 urusan	9 urusan	490.000	9 urusan	539.000	9 urusan	595.000	9 urusan	488.000	9 urusan	625.000	9 urusan	2.737.000	Bappeda	
					Keg. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	3 dok	75.000	3 Dok	150.000	3 Dok	165.000	3 Dok	175.000	3 Dok	175.000	3 Dok	185.000	3 dok	850.000	Bappeda	
					Keg. Fasilitasi Perencanaan Sektor Pertanian Perikanan Kehutanan dan Cadangan Pangan	Terfasilitasinya perencanaan sektor Pertanian Perikanan Kehutanan dan Cadangan	100%	100%	100%	100.000	12 bln	110.000	12 bln	120.000	12 bln	13.000	12 bln	140.000	100%	483.000	Bappeda	
					Keg. Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2012	Tersusunnya kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Kajian Tentang Penanganan Penyakit pada Tanaman Tembakau di Kabupaten Banyumas	Tersusunnya kajian penanganan penyakit tanaman tembakau	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Keg. Pengembangan Forum Economic Development and employment Promotion (FEDEP)	Terlaksananya kegiatan FEDEP	100%	240.000	100%	240.000	100%	264.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	1.404.000	Bappeda
					Keg. Kajian Tentang Peningkatan Kualitas Tempe Dage Melalui Proses Fermentasi Menggunakan Inokulum Unggul di Kabupaten Banyumas	Terselenggaranya Kajian Tentang Peningkatan Kualitas Tempe Dage Melalui Proses Fermentasi Menggunakan Inokulum Unggul di Kabupaten	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
		Meningkatnya kajian pengembangan potensi daerah secara analitis	ketersediaan kajian perencanaan pembangunan		Program Pengembangan Penelitian Daerah	Terfasilitasinya pengembangan penelitian daerah	2 dok.	4 dok.	2 dok.	200.000	2 dok.	220.000	2 dok.	240.000	2 dok.	260.000	2 dok.	280.000	2 dok.	1.200.000	Bappeda
					Keg. Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek	Teridentifikasinya Krenova Masyarakat di Bidang Iptek		3 Keg	3 Keg	350.000	3 Keg	385.000	3 Keg	385.000	3 Keg	385.000	3 Keg	385.000	3 Keg.	1.890.000	Bappeda
					Keg. Kajian Tanaman Bernilai Tinggi Pasca Tanaman Tembakau	Terlaksananya kajian tanaman tembakau		1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal	Terlaksananya kajian ekonomi lokal		3 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
		Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah	Prosentase peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga yang berkualitas		Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya kerjasama dengan lembaga /dunia usaha untuk kepentingan perencanaan pembangunan		3 Keg.	3 Keg.	175.000	3 Keg.	192.500	3 Keg.	210.000	3 Keg.	210.000	3 Keg.	210.000	-	997.500	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Keg. Fasilitas Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	Terlaksananya kerjasama dengan lembaga / dunia usaha		3 Keg.	3 Keg.	175.000	3 Keg.	192.500	3 Keg.	210.000	3 Keg.	210.000	3 Keg.	210.000	-	997.500	Bappeda
	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, pencairan dan	Prosentase program/kegiatan Renja SKPD yang diakomodir Prosentase kesesuaian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi															Bappeda
					Keg. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPd dan Dana Non APBD Tahun	Terlaksanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPd dan Dana Non APBD	-	-	2 dok	150.000	2 dok	165.000	2 dok	170.000	2 dok	175.000	2 dok	190.000	2 dok	850.000	Bappeda
					Keg. Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahun 2012	Terlaksanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPd dan Dana Non APBD	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Keg. Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012 dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahun 2011	Terlaksanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPd dan Dana Non APBD	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya evaluasi Mid term RPJMD	-	-	-	-	25 urusan wajib 8 Urusan Pilihan	500.000	-	-	-	-	-	-	25 urusan wajib 8 Urusan Pilihan	500.000	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Out Put/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan Up to date	Tingkat Keterseediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (Kabupaten)		Program Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya Data / Informasi / Statistik Daerah untuk Kepentingan Perencanaan daerah	3 dok.	3 dok.	4 dok.	300.000	4 dok.	330.000	4 dok.	340.000	4 dok.	360.000	4 dok.	375.000	4 dok.	1.705.000	Bappeda
					Keg. Penyusunan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersusunnya data / dokumen PDRB, Indeks Gini Ratio, NTP dan Publikasi Indeks Harga	-	3 Dok.	3 Dok.	150.000	3 Dok.	165.000	3 Dok.	175.000	3 Dok.	185.000	3 Dok.	190.000	3 dok.	865.000	Bappeda
					Peningkatan Sistem Informasi Exsecutive	Tertaksananya Peningkatan aplikasi sistem data dan informasi Pemerintah Kab.	1 Keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Penyusunan Buku PDRB, Indeks Gini Ratio, NTP dan Publikasi Indeks Harga Konsumen Kabupaten	Tersusunnya data / dokumen PDRB, Indeks Gini Ratio, NTP dan Publikasi	3 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Penyusunan Banyumas Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012	Tersusunnya buku Kabupaten Banyumas Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	2 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
					Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 (Bantuan Gub)	Tersusunnya buku Profil Daerah Kabupaten Banyumas dan buku 8 (delapan)	1 dok	1 dok	1 Dok	150.000	1 Dok	165.000	1 Dok	165.000	1 Dok	175.000	1 Dok	185.000			Bappeda
					Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data / informasi / statistik daerah	2 dok	2 dok	2 dok	100.000	2 Dok	110.000	2 Dok	150.000	2 Dok	150.000	2 Dok	175.000	2 dok	685.000	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp. (000)	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyusunan Kabupaten Banyumas Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013	Tersusunnya dokumen kab. Banyumas dalam angka dan kecamatan dalam angka	2 dok	2 dok	2 dok	100.000	2 Dok	110.000	2 Dok	150.000	2 Dok	150.000	2 Dok	175.000	2 dok	685.000	Bappeda

Bab VII
P E N U T U P

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD.

Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010- 2015 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Banyumas tahun 2005-2025.

Renstra BAPPEDA Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD. Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Nopember 2013

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS

Ir. DIDI RUDWIANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630622 198903 1 001